

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT UNTUK PENANGGULANGAN  
GELOMBANG KE-2 KASUS COVID-19 DI DKI JAKARTA**

**ANASTASIA FELICIANI**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan PPKM yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta, serta mengetahui sejauh mana peran kebijakan PPKM dalam merubah perilaku masyarakat DKI Jakarta untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak kebijakan PPKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 terhadap dinamika sosial-politik di Provinsi DKI Jakarta.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Peneliti menggunakan empat tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena implementasi dan berbagai dampak atas kebijakan PPKM yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PPKM oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta merupakan kebijakan administratif publik yang dijalankan melalui adopsi dan penyeragaman dengan berbagai ketentuan dan regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menerbitkan tiga peraturan yaitu Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi PPKM oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta secara teknis dijalankan melalui strategi menjaga jarak dan menghindari kerumunan dijalankan oleh sebagian masyarakat DKI Jakarta dan dibandingkan dengan strategi PPKM lainnya program ini yang paling sulit untuk dilaksanakan dan memiliki keterkaitan dengan kuat dengan faktor perekonomian dan perkembangan kemasyarakatan. Implementasi PPKM di wilayah DKI Jakarta direspon masyarakat secara beragam, dimana terdapat kelompok masyarakat pendukung kebijakan PPKM, namun terdapat kelompok yang menganggap bahwa kebijakan ini belum efektif. Dampak dari implementasi PPKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak positif yaitu penurunan angka positif Covid-19 yang menunjukkan pengendalian yang efektif, sedangkan dampak negatif adalah depresiasi sosial ekonomi yang menyebabkan kemiskinan di beberapa lapisan masyarakat di DKI Jakarta. .

**Kata Kunci :** Implementasi kebijakan, relasi kuasa, PPKM DKI Jakarta.

**POLICY TO ENFORCEMENT OF EMERGENCY COMMUNITY  
ACTIVITIES RESTRICTIONS (PPKM) TO MANAGE THE 2nd WAVE OF  
COVID-19 CASES IN DKI JAKARTA**

**ANASTASIA FELICIANI**

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze the implementation of the PPKM policy carried out by the Covid-19 Task Force in the DKI Jakarta area, as well as to determine the extent of the PPKM policy's role in changing the behavior of the people of DKI Jakarta to deal with the Covid-19 pandemic and the impact of the PPKM policy in dealing with the Covid-19 pandemic. 19 on the socio-political dynamics in DKI Jakarta Province.*

*The method used is descriptive qualitative using primary data sources and secondary data. The sampling technique was carried out by purposive sampling. Researchers used four stages of data analysis according to Miles & Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation. The purpose of this study was to find out the implementation phenomenon and the various impacts of the PPKM policy carried out by the Covid-19 Task Force in the DKI Jakarta area.*

*The final results of this study show that the implementation of PPKM by the Covid-19 Task Force in the DKI Jakarta area is an administrative public policy that is carried out through adoption and alignment with various provisions and regulations formulated by the central government which was then followed up by the Provincial Government of DKI Jakarta by issuing three regulations namely Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020. From this study it can be concluded that implementation of PPKM by the Covid-19 Task Force in the DKI Jakarta area is technically carried out through a strategy of keeping distance and avoiding crowds carried out by some DKI Jakarta residents and compared to other PPKM strategies this program is the most difficult to implement and has strong links with economic and development factors social. The implementation of PPKM in the DKI Jakarta area has received various responses from the community, where there are community groups that support the PPKM policy, but there are groups who think that this policy has not been effective. The impact of PPKM implementation in the DKI Jakarta Province area can be divided into two, namely the positive impact, namely a decrease in the positive number of Covid-19 which indicates effective control, while the negative impact is the socio-economic depreciation which causes poverty in several layers of society in DKI Jakarta.*

**Keywords:** *Policy implementation, power relations, PPKM DKI*